



# Perizinan Jasa Angkut Swasta Jadi Kendala

## ■ Penanganan Sampah di DIY Kembali Menemui Tantangan

**YOGYA, TRIBUN** - Penghentian kerja sama dengan jasa pengangkut swasta membuat penanganan sampah di DIY kembali menemui tantangan. Penumpukan terjadi di sejumlah depo khususnya di Kota Yogya, sementara proses evakuasi ke TPA Piyungan kapasitasnya masih sangat terbatas.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY, Kusno Wibowo menjelaskan bahwa penumpukan terjadi seiring proses transisi dari sistem pengelolaan berbasis jasa swasta ke pengelolaan mandiri oleh pemerintah.

"Sampah di kota kan dikelola menggunakan jasa swasta, namun karena ada penertiban di jasa swasta maka berdampak mulai ada penumpukan di beberapa depo. Kami dari DLHK DIY masih mengevakuasi sampah ke Piyungan namun sangat terbatas," kata Kusno, Rabu (23/7).

Penertiban yang dimaksud, menurut Kusno, berkaitan dengan perizinan jasa pengangkut sampah. Beberapa pihak swasta belum menyelesaikan proses perizinan, sehingga tidak dapat melanjutkan kerja sama dengan pemerintah.

"Diimbau bagi mereka yang belum menyelesaikan izin, untuk kemudian mohon diturus dulu dan sebagainya," paparnya.

Dalam situasi darurat seperti ini, DLHK DIY tetap mengevakuasi sampah ke Piyungan atas dasar permintaan dari pemerintah kabupaten/kota. "Nanti ada surat dari kepala daerah ke pemerintah provinsi. Jadi tidak harian. Karena sifatnya darurat," ujarnya.

Permintaan paling banyak, kata Kusno, berasal dari wilayah Kota Yogyakarta. "Secara volume dan kuantitasnya Kota Yogyakarta memang yang paling banyak (evakuasi)," ujarnya.

Meskipun demikian, pemerintah daerah tetap mengupayakan peng-

### EVAKUASI KE PIYUNGAN

- Penumpukan sampah terjadi di sejumlah depo khususnya di wilayah Kota Yogyakarta beberapa waktu terakhir.
- Penumpukan terjadi seiring proses transisi dari sistem pengelolaan berbasis jasa swasta ke pengelolaan mandiri oleh pemerintah.
- Beberapa pihak swasta belum menyelesaikan proses perizinan, sehingga tidak dapat melanjutkan kerja sama dengan pemerintah.
- DLHK DIY tetap mengevakuasi sampah ke Piyungan atas dasar permintaan dari pemerintah kabupaten/kota.

atan sistem pengelolaan di tingkat lokal. Kinerja Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) di masing-masing daerah pun terus didorong agar bisa mengelola sampah secara maksimal.

"Upaya-upaya di kabupaten/kota sudah mulai untuk peningkatan kinerjanya. Yang kemarin misal salah satu TPST yang hanya 5 ton per harinya, diupayakan sampai 10 ton. Kemudian yang lain juga ada peningkatan kinerja seperti itu," jelasnya.

DLHK DIY memastikan bahwa secara umum arah kebijakan desentralisasi pengelolaan sampah tetap berjalan sesuai dengan konsep yang telah disepakati sejak awal.

"Bahwa untuk masing-masing kabupaten/kota ada upaya untuk pengu-rangan sampah, dengan adanya peningkatan kinerjanya di TPS3R dan sebagainya. Ini masih berjalan, masih sesuai dengan target di awal," kafa Kusno.

### Belum optimal

Untuk diketahui, sekitar 1.000 ton sampah masih menumpuk di depo-depo atau tempat penampungan sementara di sejumlah titik Kota Yogyakarta pada Selasa (22/7).

Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta, Ahmad Haryoko, mengungkapkan bahwa upaya pengolahan yang belum optimal tersebut membuat sampah harus disimpan di depo-depo

yang tersedia.

Sehingga, tidak hanya Depo Mandala Krida, deretan tempat penampungan sementara di Kotabaru, Pengok, hingga THR, kondisinya pun terisi penuh. Kondisi ini bisa saja mengganggu warga yang melintas dari sisi visual maupun bau yang tak sedap.

"Hampir semuanya terisi. Kondisinya sekarang sekitar 1.000 ton sampah kita akumulasikan (menumpuk) di semua depo," katanya.

Haryoko pun mengakui, dengan timbunan yang teramat banyak, dibutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk menormalisasi, atau mengosongkan depo seperti sedia kala.

Bahkan, sembari menunggu antrean di Unit Pengolahan Sampah (UPS), deretan truk berisi limbah harus diparkirkan sementara di Kantor DLH Kota Yogyakarta.

Dijelaskan, kuota pembuangan sampah menuju TPA Piyungan yang diberikan Pemda DIY pun belum mampu mengatasi situasi kedaruratan di Kota Yogyakarta.

Bukan tanpa alasan, kondisi sejauh ini memang belum seimbang antara kekuatan pengolahan dan timbunan limbah yang dihasilkan setiap harinya.

"Makanya, beliau-beliau di Pemda DIY masih memfasilitasi kita supaya tidak terjadi timbunan sampah di depo. Kuotanya sebulan sekitar 600 ton," terangnya. **(han/aka)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Juli 2026  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005